



PERBANDINGAN PEMIKIRAN DEMOKRASI PENDIDIKAN PAULO FREIRE DAN MUHAMMAD ATHIYAH AL-ABRASYI

Ahmad Abdul Qiso

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: qiso.ahmad93@gmail.com

Ani Nafisah

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: aninafisah71@gmail.com

Abstract

In today's era, democratic education is a must for a nation, because democracy provides the best opportunities that can provide equal and fair opportunities, respect human dignity, and cooperation opportunities that can win all parties. The dream of quality education can only be realized in the realm of educational democracy. However, in reality democratic education in our educational practice has not been implemented seriously, students are still constrained by the current education system.

This study will discuss the democratic thinking of education by Paulo Freire and Muhammad Athiyah Al-Abrasyi. The data was extracted by conducting a literature review, looking for literature either from books or journals that discussed the thoughts of the two great figures. The results of this research are according to Paulo Freire, democratic education or liberating education is education that will not be separated from the oppressed, will not treat them as 'unlucky people' and treat the oppressed as role models among the oppressors. The education of the oppressed is carried out by authentic generosity, humanist (not humanitarian) generosity, presenting itself as human education. Meanwhile, according to democracy, according to Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, education is the idea of a worldview that prioritizes rights and obligations as well as equal treatment for all citizens in the ongoing education process. Al-Abrasyi's thoughts on education democracy are in line with the concept of human freedom which leads to opportunity and equality in obtaining education.

Keywords: *Comparison, Educational Democracy, Paulo Freire, M. Athiyah Al-Abrasyi*



Abstrak

Di era dewasa ini, pendidikan demokrasi mejadi suatu keharusan bagi suatu bangsa, karena demokrasi memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat manusia, dan peluang kerjasama yang dapat memenangkan semua pihak. Impian pendidikan yang bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Namun, kenyataannya pendidikan demokrasi dalam praktek pendidikan kita belum diterapkan secara serius, peserta didik masih terkekang oleh sistem pendidikan yang dijalankan saat ini.

Penelitian ini akan membahas tentang pemikiran demokrasi pendidikan Paulo Freire dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi. Data-data digali dengan melakukan kajian pustaka, mencari literature-literatur baik dari buku atau jurnal yang membahas tentang pemikiran dua tokoh besar tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut Paulo Freire, demokrasi pendidikan atau pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai 'orang-orang yang tak beruntung' serta menyugahi kaum tertindas itu model panutan diantara kaum penindas. Pendidikan kaum tertindas ini dijalankan oleh kemurahhatian otentik, kedermawanan humanis (bukan *humanitarian*), menampilkan diri sebagai pendidikan manusia. Sedangkan menurut demokrasi pendidikan menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Pemikiran Al-Abrasyi tentang demokrasi pendidikan, sejalan dengan konsep kebebasan manusia yang mengarah pada kesempatan dan persamaan dalam mendapatkan pendidikan.

Kata kunci: Perbandingan, Demokrasi Pendidikan, Paulo Freire, M. Athiyah Al-Abrasyi



A. PENDAHULUAN

Impian pendidikan yang bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam kehidupan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.¹

Menurut Benyamin Barber, demokrasi bukanlah bentuk organisasi yang tumbuh secara alami, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai hasil usaha keras menggali ide-ide dengan penuh imajinasi.² Sedangkan menurut Mastuhu, demokrasi³, termasuk demokrasi pendidikan, memang bukan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit pembangunan, termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi “demokrasi” memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat manusia, dan peluang kerjasama yang dapat memenangkan semua pihak.⁴ Namun, demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi, bukan pula “barang instan”, demokrasi adalah proses yang masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan guna menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan kata lain, berbicara demokrasi adalah juga berbicara tentang mentalitas bangsa.⁵

Hal di atas menunjukkan bahwa demokrasi akan terealisasi apabila masyarakat menyadari pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disisi lain, pemerintah juga harus mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung terealisasinya demokrasi. Namun sayangnya dalam realitasnya demokrasi kini sangat mudah diucapkan akan tetapi masih sulit dipraktekkan.

¹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 84.

² *Ibid.*, Zamroni, hlm. 15-16.

³ Revolusi demokrasi pecah hampir bersamaan waktunya dengan munculnya revolusi industri. Asal usul demokrasi dapat ditelusuri kembali pada zaman Yunani yang mencoba membentuk negara untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisir sehingga bisa mensejahterakan warganya. Namun demikian, pada era modern demokrasi terkenal bersamaan meletusnya revolusi Perancis untuk membebaskan rakyat dari sistem politik otoriter, dengan semboyannya: *Liberte, egalite, fraternite*. Di Amerika Serikat, sosok demokrasi menjadi lebih jelas dengan semboyannya: *government of the people, by the people, and for the people*. Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul berbagai macam variasi demokrasi, misalnya: demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi terpimpin. *Ibid.*, Zamroni, hlm. 27.

⁴ *Ibid.*, Mastuhu, hlm. 85.

⁵ Pengantar Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, tth), hlm. vi



Disamping itu, satu hal yang disayangkan juga, dunia pendidikan kita masih acapkali hanya sebagai aktivitas *transfer of knowledge*, padahal, pendidikan pada dasarnya adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya, yaitu: pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kita bertujuan untuk menciptakan suasana pendidikan yang menumbuhkan kesadaran, kedewasaan, dan kemandirian.

Di satu sisi, melalui pendidikan pula penumbuhan kultur demokrasi dapat terealisasi. Sistem pendidikan suatu bangsa, akan sangat mempengaruhi mentalitas dan perilaku pejabat publiknya. Kita tidak dapat menafikan bahwa dalam realitas sejarah, pendidikan acapkali dijadikan “alat” dalam melanggengkan kekuasaan, yang berimplikasi pada hilangnya profesionalisme dan independensi institusi pendidikan. Jika hal ini yang terjadi, maka institusi pendidikan kita lebih bersifat birokratis dan hirarkis-sentralistik, yaitu tunduk pada intruksi dan petunjuk atasan, sedangkan iklim demokrasi yang kita harapkan masih “jauh panggang dari api”. Jika sekolah tidak menghidupkan iklim demokrasi, mustahil akan lahir generasi-generasi yang berwatak demokratis.

Oleh karena itu, demokrasi pendidikan menjadi sangat penting untuk direalisasikan secara praktis, jangan sampai hal ini hanya menjadi jargon verbalistik semata. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh *stakeholder* yang terkait, harus menyambut positif gagasan demokrasi pendidikan, sebagai upaya mengawal institusi-institusi pendidikan supaya *on the track*, yaitu pendidikan yang mampu membangun kedewasaan dalam berfikir, kesadaran dalam bertindak, dan kemandirian dalam berkarya.

Hal di atas, menunjukkan bahwa reformasi dan transformasi institusi pendidikan menjadi institusi demokratis menjadi suatu keharusan. Menurut Zamroni, salah satu implikasi dari transformasi pendidikan adalah sistem dan cara belajar dewasa ini yang siswa dipacu berusaha bab-bab yang ada dalam buku harus dirombak dan guru harus tidak sekedar memberikan informasi, memberikan tes kemudian memberikan nilai. Lebih jauh dari itu, mata pelajaran yang diajarkan hanya merupakan sarana membentuk

⁶ Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, tth), hlm. 24.



peserta didik, baik intelektual, personal maupun aspek sosial. Untuk itu, guru harus memahami apa yang dipikirkan dan dipahami oleh siswa, serta mampu mengembangkan hubungan yang akrab dengan mereka, sehingga dapat menciptakan *learning performance* yang otentik; memperhatikan perkembangan siswa; menghormati perbedaan di kalangan siswa.⁷

Dengan demikian, sistem demokrasi pendidikan akan melahirkan generasi-generasi di masa mendatang yang memiliki kemampuan akademik, profesionalisme, dan indenpendensi. Generasi-generasi inilah yang akan menentukan nasib bangsa kita di masa mendatang, apabila proses penyiapannya baik, maka akan lahirlah pemangku-pemangku kebijakan yang baik pula, begitupun sebaliknya.

Perluh kita sadari bersama, bahwa kehidupan manusia di era melinium ketiga (abad XXI) ini melahirkan persaingan yang sangat tajam. Untuk menjadi pemenang dalam persaingan tersebut, menurut Prof. Abuddin Nata, selain ia harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup dan bermutu, juga harus bersikap modern seperti kreatif, inovatif, dinamis, progresif, terbuka, dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.⁸ Hal ini menunjukkann bahwa setiap individu dituntut memiliki keahlian, untuk bekal bersaing dan bertanding di era milinium ketiga ini. Menurut Eko Supriyanto, dkk (2009), “Tanpa adanya penyeimbangan dengan tuntutan globalisasi, dunia pendidikan kita akan terjebak pada situasi *blunder*, yaitu munculnya keadaan dimana pendidikan justru menjadi beban masyarakat dan negara, akibat munculnya pengangguran dari pendidikan yang tidak produktif dan *drilling*⁹”.

Untuk itu, menurut hemat penulis, dalam meningkatkan daya saing dan menyeimbangi tuntutan globalisasi, diperlukannya demokrasi pendidikan. Agar lahir manusia-manusia yang cakap dan berdaya saing, serta mampu mengeksplorsi semua potensi yang dimilikinya. Menurut Zamroni, pemaksaan yang dilakukan di sekolah

⁷ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁸ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: Prenanada Media Group, 2012), hlm. 131.

⁹ Eko Supriyanto, dkk, *Inovasi Pendidikan: Isu-isu baru pembelajaran, manajemen, dan sistem pendidikan di Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009), hal. 9. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: *Drilling*, yaitu keadaan dimana praktik pendidikan mengarah pada situasi yang berkecendrungan sebatas menghafal dan mengajarkan hal yang tidak mendorong siswa produktif dan kreatif sehingga pendidikan tidak mampu menolong peserta didik mencari jati dirinya sendiri.



hanya akan menumbuhkan frustrasi yang cepat atau lambat akan melahirkan memerosotkan rasa percaya diri, keputus-asaan, dan kekerasan terhadap satu dengan yang lain.¹⁰ Konsekuensi dari demokrasi pendidikan, sekolah harus mendorong dan memberikan kesempatan semua siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan, dan melaksanakan rencana tersebut.¹¹

Menurut Syafi'i Ma'arif, prinsip demokrasi dapat ditanamkan sedini mungkin dalam sistem pendidikan kita, seperti kebebasan berpendapat, membangun tradisi ilmiah yang obyektif dan progresif, kultur dialog, dan sebagainya. Tanpa itu, jangalah berharap institusi-institusi pendidikan kita akan menghasilkan generasi yang cerdas, terbuka, mandiri, dan demokratis; sebaliknya yang muncul adalah generasi yang selalu gamang dengan keadaan, tidak siap menyongsong masa depan di era yang sangat kompetitif, mandul dalam berkarya,—dana parahnya—generasi yang tidak merdeka dengan dirinya sendiri.¹²

Menurut Zamroni, ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan gagal terwujudnya demokrasi dalam dunia pendidikan, yaitu:¹³ (1) Inkompatibilitas antara nilai-nilai yang disosialisasikan di sekolah dengan nilai-nilai yang disosialisasikan di lingkungan keluarga dan lingkungan lain;¹⁴ (2) Semakin dominannya pengaruh lembaga politik;¹⁵ (3) Tekanan dari lingkungan ekonomi, dengan menempatkan dunia sekolah sebagai instrumen dalam pembangunan;¹⁶ (4) Menurunnya kredibilitas guru;¹⁷ (5) Iklim kelas yang tertutup dan ketat.¹⁸

¹⁰ *Ibid.*, Zamroni hlm. 11-12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹² Pengantar Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam Zamroni, hlm. x.

¹³ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 35-45.

¹⁴ Hal ini akan menyebabkan siswa bisa semakin terbawa pada nilai-nilai “lain” atau “baru” dan sekolah gagal mencapai tujuan.

¹⁵ . Hal ini mengakibatkan sistem pendidikan kita bersifat sentralistik (hasilnya berkembanglah manusia-manusia dengan mentalitas “juklak” dan “juknis” yang siap diberlakukan secara seragam) dan sebagai media indoktrinasi (lebih berorientasi pada hasil bukan prosesnya).

¹⁶ Hal ini mengakibatkan pendidikan diperlakukan sebagai lembaga yang mencetak “tenaga kerja”, bukan lembaga yang menghasilkan “manusia” yang utuh (*the whole person*). Akibat dari mentalitas sekolah semacam itu, maka muncullah generasi terdidik yang bersifat materialistik, individualistik, dan konsumtif, serta memiliki mentalitas “jalan pintas”. Disamping itu, semakin dominannya nilai ekstrinsik di kalangan siswa.

¹⁷ Kalau dimata murid guru merupakan sosok yang dapat dipercaya, mampu dan dapat dijadikan model bagi para siswa maka pengaruh cukup besar dalam proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Namun, akhir-akhirnya ini sebagian guru yang menunjukkan sikap inkonsisten, sehingga kredibilitasnya di mata siswa menurun.

¹⁸ Hal ini mengakibatkan tidak memungkinkan munculnya ide dan kreatifitas siswa. Apa yang dipelajari hanya apa yang ada di buku teks, dan apa yang ada di buku teks seakan-akan merupakan “Sabda Tuhan” yang haram untuk dibantah dan dikritik.



Terwujudnya sistem pendidikan yang demokratis, sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, apakah “*authoritarian*” atau “*democratic*”, hal ini sangat mempengaruhi iklim sekolah. Kepemimpinan sekolah yang demokratis akan mengundang partisipasi dari guru, pegawai administrasi dan juga murid. Sebaliknya, kepemimpinan yang bersifat otoriter akan menimbulkan iklim sekolah tertutup.¹⁹

Namun, perlu dicatat, demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi yang “bebas tanpa batas”. Tata tertib, peraturan, dan rasa tanggung jawab merupakan instrumen lahirnya pendidikan yang demokratis. Namun, dalam konteks demokrasi, sekolah dituntut untuk meningkatkan kedisiplinan tanpa adanya kekerasan, kepatuhan tanpa adanya ancaman, dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan.

Untuk mengeksplorasi gagasan demokrasi pendidikan secara mendalam, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam. Dalam makalah ini penulis akan mencoba mengelaborasi dan memandangkan dua pandangan tokoh dalam konteks gagasan demokrasi pendidikan, yaitu Paulo Freire dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi.

Paulo Freire merupakan sosok pendidik, teolog, humanis, sosialis, dan bahkan dianggap mesias dunia ketiga (khususnya masyarakat Amerika Latin). Ia tidak hanya seorang yang kontroversial dengan metode pendidikan revolusionernya, namun juga sosok yang sulit diterka. Perkembangan ide-ide kependidikannya dari tiap tahap kehidupan dan tiap pekerjaan yang dilakoninya cukup menjadikan ia seorang pembebas pejuang dunia ketiga yang sulit ditebak. Pemikiran pendidikannya selalu menceminkan nada gugatan, protes dan berontak terhadap segala bentuk pendidikan yang telah mencerabut manusia dari kesadarannya.²⁰ Eksistensi dan peran besarnya dalam dunia pendidikan sebagai salah satu kontributor teori-teori pendidikan menempatkan dirinya dalam deretan orang-orang yang revolusioner-radikal. Sifat optimismenya sebagai pendidik, meski dalam pemenjaraan dan pembuangan, kontroversialnya kepribadian dan revolusionernya metode pendidikannya, telah menjadikannya sebagai seorang pemimpin perjuangan kaum tertindas di dunia ketiga.²¹

¹⁹ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 53-54.

²⁰ *Ibid.*, Abd. Malik Haramain, et.al., *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, (Yogyakarta: Averroes Press, 2001), hlm. 145.

²¹ *Ibid.*, hlm. 146-147.



Dalam pandangan Freire, pendidikan itu mempunyai dua kekuatan sekaligus: (1) sebagai aksi kultural untuk pembebasan atau sebagai aksi kultural untuk dominasi dan hegemoni; (2) sebagai medium untuk memproduksi sistem sosial yang baru atau sebagai medium untuk memproduksi status quo.²²

Menurut Freire, pendidikan yang benar-benar membebaskan takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai 'orang-orang yang tak beruntung' serta menyuguhi kaum tertindas itu model panutan diantara kaum penindas. Pendidikan kaum tertindas ini dijalankan oleh kemurah-hatian otentik, kedermawanan humanis (bukan *humanitarian*), menampilkan diri sebagai pendidikan manusia.²³

Substansi pemikiran pendidikan Freire terletak pada pandangannya tentang manusia, tentang dunianya yang kemudian ditransformasikan ke dalam dunia pendidikan yang menghasilkan model pendidikan alternatif yang ditawarkannya, yaitu model pendidikan yang membelenggu ke model yang membebaskan²⁴

Freire memandang bahwa pendidikan sistem lama yaitu sistem bank harus diubah menjadi sistem yang seimbang, egaliter, dan adil, yaitu sistem yang memberikan peluang dan kebebasan kepada peserta didik untuk ikut serta menentukan arah dan program pendidikan. Praktek pendidikan gaya bank ini mencerminkan penindasan yang terjadi di masyarakat sekaligus memperkuat struktur yang menindas. Pendidikan menjadi alat dominasi yang dimanfaatkan untuk penjinakan.²⁵

Menurut Abuddin Nata, secara umum, pemikiran Paulo Freire bercorak humanisme rekonstruksionis. Yakni pendidikan yang diarahkan pada usaha membantu masyarakat, terutama kaum yang tertindas²⁶, dan pendidikan yang meberdayakan dan bertolak dari kepentingan masyarakat, bukan pendidikan yang didasarkan atas kemauan penguasa.²⁷

²² M. Agus Nuryanto, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm. 39

²³ Paulo Freire, dkk, *Menggugat Pendidikan: Fundamentalisme, Konservatif, Libral, Anarkis*, Penerjemah: Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 444.

²⁴ *Ibid.*, Abd. Malik Haramain, et.al., hlm. 159.

²⁵ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 265-266.

²⁶ Menurut Agus Nuryanto, paling tidak ada dua ciri orang yang tertindas, yaitu: (1) Mereka mengalami alienasi dari diri dan lingkungannya. Mereka tidak bisa menjadi obyek otonom, tapi hanya mampu mengimitasi orang lain; (2) Mereka mengalami *self-depreciation*, merasa bodoh, tidak mengetahui apa-apa. *Ibid.*, M. Agus Nuryanto, hlm. 38.

²⁷ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 264.



Adapun Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, beliau merupakan seorang ulama, cendekiawan yang telah mendalami agama Islam dengan baik, menguasai beberapa bahasa asing, seorang psikolog dan pendidik jebolan London, penulis yang produktif dan seorang guru besar. Sebagai salah seorang dari sekian banyak ilmuwan muslim yang sangat produktif mencetuskan gagasan dan ide menuju perbaikan dan peningkatan kualitas umat islam pada era sekarang ini dengan menawarkan konsep-konsep dasar bagi pendidikan islam yang merupakan hasil dari sari pati dari nilai ajaran al-Qur'an dan al-Hadits yang di galinya.²⁸

Ide Demokrasi pendidikan Islam Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi ini bisa di lihat dalam pernyataannya berikut ini:

“Islam telah menyeruhkan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan sosial seseorang siswa. Pelajaran-pelajaran dalam Islam itu gratis, siswa tidak terikat pada usia umur tertentu, ijazah-ijazah atau nilai-nilai angka dalam ujian atau peraturan-peraturan khusus buat penerimaan siswa. Bila seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan rasa cinta ilmu, kegairaan untuk mengadakan penelitian dan pembahasan, pintu untuk belajar terbuka luas baginya, bahkan Islam mendorong supaya mereka belajar, apalagi bila seseorang itu berpembawaan cerdas.”²⁹

Menurut al-Abrasyi, pendidikan adalah mempersiapkan individu atau pribadi agar bisa: menghadapi kehidupan ini secara sempurna, hidup bahagia, cinta tanah air, kuat jasmani, sempurna akhlaknya, teratur dalam berfikir, berperasaan lembut, mahir di bidang ilmu, saling membantu dengan sesamanya, memperindah ungkapan pena dan lisannya serta membaguskan amal perbuatannya.³⁰

Jadi, dalam makalah ini pembahasan akan di konsentrasikann pada: bagaimana pemikiran demokrasi pendidikan Paulo freire dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi dan bagaimana perbandingan pemirkian demokrasi pendidian Paulo freire dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi.

B. METODE PENELITIAN

²⁸ Abu Kasim, *Konsep Pendidikan Islam (Tela'ah pemikiran Muhammad athiyah al-Abrasyi)*, , JIPTIAN (Knowledge Management Research Group), 2008. hlm. 22

²⁹ Mohd. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-6.

³⁰ Lihat, Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendiidkan Islam: Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 198.



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library reserarch* (studi pustaka). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah literatur-literatur (buku atau jurnal) yang relevan dengan pembahasan dalam artikel ini, yaitu berkaitan dengan “Pemikiran Demokrasi Pendidikan Paulo Freire Dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi”. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi).

C. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

1. Biografi Tokoh

a. Biografi Paulo Freire

1) Kelahiran dan Perjalanan Hidup Paulo Freire

Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Brazil yang merupakan pusat salah satu daerah paling miskin dan terbelakang di dunia ketiga, yaitu sebuah kota pelabuhan di sebelah Timur Laut negeri Brazil. Ia hidup dalam keluarga yang menyenangkan yang menjunjung tinggi dialog dan menghargai pilihan seseorang,³¹

Setelah menikah dengan Elza Maia Costa Oliveira –seorang guru dari Recife- tahun 1944, mulai tumbuh minatnya mendalami buku-buku pendidikan (filsafat pendidikan dan sosiologi pendidikan) melebihi buku-buku tentang hukum. Walau begitu, ilmu hukumnya tetap berjasa. Berkat ijazah hukum, ia dapat menjabat Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebuah Lembaga Pelayanan Sosial di Pernambuco. Bekerja di lembaga sosial membuatnya sering berkontak secara langsung dengan orang-orang miskin kota. Pengalaman ini kelak juga ikut mempengaruhi filosofi pendidikannya.³²

Tahun 1961 Joao Goulart menggantikan Janio Quadros sebagai presiden Brazilia. Di masa presiden baru ini gerakan kaum petani dan kaum budayawan melakukan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan

³¹ Dennis E. Collins, SJ, Paulo Freire: *His Life, Works and Thought*, (New York: Paulist Press, 1977), hlm. 5.

³² *Ibid.*, Dennis E. Collins, SJ, Paulo Freire, hlm. 6.



kemampuan baca tulis supaya rakyat dapat berpartisipasi aktif di bidang politik.³³ Freire sendiri mengembangkan program literasi (melek huruf) bagi ribuan petani di daerah Recife dari Juni 1963 sampai Maret 1964. Program ini disambut dengan antusias besar oleh rakyat Brazilia.³⁴ Ia menggunakan metode conscientization (konsientasi: penyadaran) untuk membangkitkan kesadaran rakyat atas realitas yang menindas mereka, dan bangkitnya kesadaran rakyat menimbulkan dampak terhadap perubahan sosial. Tetapi kesadaran rakyat ini sekaligus membuat khawatir pihak militer dan tuan tanah.³⁵

Pada 1 April 1964, militer berhasil menggulingkan rezim Goulart. Pada rezim militer ini gerakan kerakyatan ditekan. Freire ditangkap dan dimasukkan ke penjara selama 70 hari dengan tuduhan melakukan kegiatan subversif. Di penjara ia menulis karya pertamanya *educacao Como Pratica da Liberdade* (Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan). Pada tahun 1970, ia menjadi penasehat pendidikan pada kantor pendidikan dewan gereja-gereja se dunia di Janewa, Swiss. Sampai tahun 1979 ia tetap tidak diizinkan kembali ke Brazil, baru setelah itu ia diperbolehkan oleh pemerintahan Brazil untuk menetap kembali di Brazil. Pada tahun 1996 ia meninggal dunia dalam usia tujuh puluh lima tahun karena serangan jantung. Pada tahun 1970, ia menjadi penasehat pendidikan pada kantor pendidikan dewan gereja-gereja se dunia di Janewa, Swiss. Sampai tahun 1979 ia tetap tidak diizinkan kembali ke Brazil, baru setelah itu ia diperbolehkan oleh pemerintahan Brazil untuk menetap kembali di Brazil. Pada tahun 1996 ia meninggal dunia dalam usia tujuh puluh lima tahun karena serangan jantung.³⁶

2) Karya- karya Paulo Freire

Diantara karya-karya Paulo Freire, yaitu:³⁷

a) Pedagogy of the Oppressed

³³ Myra Bergman Ramos (ed), *Education as The Practice of Freedom*, (London:Writers 7 Readers Publishing Cooperative, 1974), hal. 30-31

³⁴ Bagi Freire, pemecahan masalah yang menimpa masyarakat Brazilia harus diadakan bersama rakyat bukan untuk rakyat, juga bukan dengan memaksa rakyat. Yang diperlukan adalah terjun ke tengah rakyat dan mengajak mereka memasuki proses sejarah yang kritis. Myran Bergman Ramos (ed), *Education as The Practice of Freedom*, hal. 16

³⁵ Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Terj. Alois A. Nugroho, (Jakarta:Gramedia, 1984), hal. 30

³⁶ The New York Times 6 Mei 1997 dalam BASIS, hal. 30

³⁷ Aloys Maryoto. *Pendidikan Sebagai Proses Penyadaran Menurut Paulo Freire dalam Fenomena*. (Edisi 2/Th.V/1994). hlm. 18



- b) Pedagogy of the City
- c) Pedagogy of Hope
- d) Pedagogy of the Heart
- e) Pedagogy of Freedom
- f) Pedagogy of Indignation

Di Indonesia, penyebaran pemikiran Freire dapat dilihat dari begitu banyaknya karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terutama setelah tumbanganya Orde Baru. Buku-bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain: Pendidikan yang Membebaskan, Belajar Bertanya, Politik Pendidikan, Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan, Pendidikan Kaum Tertindas, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Dialog Bareng Paulo Freire, Sekolah Kapitalisme yang Licik, dan Pendidikan Sebagai Proses, Surat Menyurat Pedagogis Dengan Para Pendidik Guinea Bissau.

b. Biografi Muhammad Athiyah Al Abrasyi

1) Kelahiran dan Perjalanan Hidup Muhammad Athiyah Al Abrasyi

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi adalah seorang tokoh pendidikan yang hidup pada masa pemerintahan pada Abd. Nasser yang memerintah Mesir pada tahun 1954-1970. Beliau adalah satu dari sederetan nama yang tidak boleh dilupakan oleh para cendekiawan Arab dan muslimin. Beliau adalah penulis tentang pendidikan keislaman dan pemikiran, umurnya yang mendekati 85 tahun akan selalu terasa pengaruhnya bagi generasi sesudahnya. Beliau dilahirkan pada awal April tahun 1897 dan wafat pada tanggal 17 Juli 1981. Beliau memperoleh gelar Diploma dari Universitas Darul Ulum tahun 1921, dan tahun 1924 beliau terbang ke Inggris, disana beliau mempelajari ilmu pendidikan, psikologi, sejarah pendidikan, kesehatan jiwa, bahasa Inggris berikut sastranya. Pada tahun 1927 beliau memperoleh gelar sarjana pendidikan dan psikologi dari Universitas Ekstar, dan pada tahun 1930 beliau berhasil menggondol dua gelar sarjana bahasa, masing-masing adalah bahasa Suryani dari Universitas kerajaan di London, dan bahasa Ibrani dari Lembaga Bahasa Timur di London.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 12.



Muhammad Athiyah Al-Abrasyi adalah seorang sarjana yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Mesir yang merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam, sekaligus sebagai guru besar pada Fakultas Darul Ulum Cairo University, Cairo. Sebagai guru besar, beliau secara sistematis telah menguraikan pendidikan Islam dari zaman ke zaman serta mengadakan komparasi di bidang pendidikan mengenai prinsip, metode, kurikulum dan sistem pendidikan modern di dunia Barat pada abad ke-20 ini.³⁹

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi adalah seorang ulama, cendekiawan yang telah mendalami agama Islam dengan baik, menguasai beberapa bahasa asing, seorang psikolog dan pendidik jebolan London, penulis yang produktif dan seorang guru besar. Sebagai salah seorang dari sekian banyak ilmuwan muslim yang sangat produktif mencetuskan gagasan dan ide menuju perbaikan dan peningkatan kualitas umat islam pada era sekarang ini dengan menawarkan konsep-konsep dasar bagi pendidikan islam yang merupakan hasil dari sari pati dari nilai ajaran al-Qur'an dan al-Hadits yang di galinya.⁴⁰

Sesuai dengan keahliannya, beliau telah menjelaskan tentang posisi Islam mengenai ilmu, pendidikan dan al-Hadits, serta menjelaskan pula tentang fungsi masjid, institut, lembaga-lembaga, perpustakaan, seminar, dan gedung-gedung pertemuan dalam dunia pendidikan Islam dari zaman keemasannya sampai pada kita sekarang ini.⁴¹ Seperti diketahui pada zaman kejayaan Islam, Negeri Mesir dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan disamping Baghdad, Damaskus, Cordova dan lain-lain. Tetapi kemudian ketika dunia islam mengalami kemunduran, Mesir pun turut merasakannya, lebih-lebih setelah negeri ini berturut-turut dijajah Prancis dan Inggris. Akibatnya Mesir mengalami kemunduran di bidang pemikiran pada umumnya dan pendidikan pada khususnya. Di dorong kenyataan pahit inilah Muhammad Athiyah al-Abrasyi mencoba kembali menggali nilai-nilai dan unsur-unsur pembaharuan yang terpendam dalam khazanah perkembangan pendidikan Islam dimasa jayanya. Ia mencoba mencari titik persamaan dasar pendidikan islam dan pendidikan modern.

³⁹ *Ibid.*, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok...*, hlm. 20-21

⁴⁰ Abu Kasim, *Konsep Pendidikan Islam (Tela'ah pemikiran Muhammad athiyah al-Abrasyi)*, , JIPTIAN (Knowledge Management Research Group), 2008. hlm. 22

⁴¹ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok...*, hlm. 27

Latar belakang kehidupan dan pendidikan yang dilalui beliau merupakan modal dasar bagi beliau untuk berkiprah sebagai salah seorang di antara pembaharu di Mesir dan dunia islam, mengingat umat dan masyarakat yang dihadapinya sedang bangkit dan berkembang ke arah kemajuan. Keberhasilan pendidikan islam dari semula sampai dimasa jayanya menurut beliau dapat dibuktikan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Khaldun dan Ibnu Maskawaih. Pendapat Muhammad Athiyah al-Abrasyi tentang pendidikan islam banyak dipengaruhi oleh dan dari rangkuman, saduran, pemahaman, dan pemikiran serta pendidik muslim sebelumnya yang di telusurinya dengan baik terutama pemahaman secara filosofis. Beliau cenderung menjadikan Ibnu Sina, al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sebagai narasumber.⁴²

2) Karya-karya Muhammad Athiyah Al-Abrasyi

Adapun karya-karya Muhammad Athiyah al-Abrasyi diantaranya adalah:⁴³

- a) Ruh al-Islam, Isa al- Babel Halabi bi Sayidina Husaini, Cairo.
- b) Uzmat al- Islam, jilid I dan II, Mesir, Cairo.
- c) At-Tarbiyah Islamiyah, Dar al-Qoumiyah li al-Tiba'ati wa al-Nashir, Cairo.
- d) At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha, Isa al-Babel Halabi, Mesir.
- e) Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, Isa al-Babel Halabi, Mesir.
- f) Uzmat al-Rasul Muhammad SAW, Dar al-Katib al-Araby, Cairo.
- g) Al-Ittijahat al-haditsah fi al-Tarbiyah, Isa al-Babel Halabi, Mesir.
- h) Al-Thuruq al-Khassat al-Haditsah fi al-Tarbiyah li Tadris al-Lughat al-Arabiyyah Wadiin, Mesir.
- i) At-Tufalah Sani'atul Mustaqbal au Kaifa Nurabbi at-Falana, Mesir.
- j) Al-Ilmu Shi'ar al-Surah Thaqofyah, Al-Anglo, Mesir.

2. Pemikiran Demokrasi Pendidikan Paulo Freire dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi

- a. Pemikiran Paulo Freire tentang Demokarsi Pendidikan

⁴² Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, (Saudi Arabia: Dar al-Ahya', tth.) hlm 324.

⁴³ *Ibid.*, 410.

Inti dari bentuk pendidikan yang diajukan oleh Paulo freire adalah "Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan (Demokrasi)" memberikan tekanan khusus pada pentingnya pemunculan kesadaran kritis sebagai penggerak emansipasi kultural.

Adapun Karangka dasar dari pemikiran demokrasi pendidikan Paulo Freire adalah sebagai berikut:

1) Landasan Befikir Paulo Freire

Substansi pemikiran pendidikan Freire terletak pada pandangannya tentang manusia, tentang dunianya yang kemudian ditransformasikan ke dalam dunia pendidikan yang menghasilkan model pendidikan alternatif yang ditawarkannya, yaitu model pendidikan yang membelenggu ke model yang membebaskan.⁴⁴

Menurut Freire, pendidikan yang benar-benar membebaskan takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai 'orang-orang yang tak beruntung' serta menyuguhi kaum tertindas itu model panutan diantara kaum penindas. Pendidikan kaum tertindas ini dijalankan oleh kemurah-hatian otentik, kedermawanan humanis (bukan *humanitarian*), menampilkan diri sebagai pendidikan manusia.⁴⁵

Dalam pandangan Freire, konstruksi pendidikan yang ideal adalah yang didasarkan pada konsep etis dan utopis yang bisa memperluas ruang-ruang publik yang demokratis dan melahirkan sebuah struktur sosial yang adil di mana harkat kemanusiaan terlindungi dan kondisi kehidupan manusia meningkat.⁴⁶

Disamping Freire memandang bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan, dia juga mengatakan bahwa "*educational is politics*", hal ini mengandung banyak arti diantaranya: (1) semua aktifitas pendidikan itu pada dasarnya bersifat politis dan punya konsekuensi dan kualitas politis; (2) proses pembelajaran di kelas tidaklah semata-mata akuisisi dan transmisi pengetahuan, tapi merupakan proses untuk memahami, mengkritik, memproduksi, dan menggunakan pengetahuan sebagai sebuah alat untuk mengubah realitas.

⁴⁴ *Ibid*, Abd. Malik Haramain, et.al., hlm. 159.

⁴⁵ Paulo Freire, dkk, *Menggugat Pendidikan: Fudamentalisme, Konservatif, Libral, Anarkis*, Penerjemah: Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 444.

⁴⁶ *Ibid.*, M. Agus Nuryanto, hlm. 51.

Muatan politik dalam teori dan praktek pendidikan Freire, sejalan dengan pendapat Zamroni, yang memandang bahwa kegiatan organisasi sekolah merupakan “aktivitas politik semu” (*quasi political activities*). Sebab, menurutnya, dalam sekolah dilaksanakan kegiatan sebagaimana kegiatan dalam proses politik yang ada di masyarakat, seperti pemilihan pimpinan organisasi dan badan legeslatif, menentukan program dan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.⁴⁷

2) Metode Pendidikan

Metode adalah seperangkat strategi dan cara tertentu yang digunakan untuk menghantarkan materi pendidikan yang telah disepakati bersama dalam proses belajar mengajar. Dalam mengajukan metode pendidikan Freire menggunakan istilah “pendidikan hadap masalah” (*Problem posing education*).⁴⁸ Pendidikan hadap masalah, dapat digunakan dalam mengatasi kontradiksi guru murid dengan hubungan dan situasi dan situasi pembelajaran yang dialogis.⁴⁹

Di sisi lain, metode pendidikan hadap masalah juga tidak memicu dikotomi kegiatan murid-murid, sehingga proses pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, dan oleh karenanya masing-masing harus berperan aktif dalam proses itu. Tak ada kewenangan guru dalam konsep pendidikan ini, kecuali kewenangan untuk terus-menerus melakukan dialog bersama murid dan berefleksi bersama mereka mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Proses dialog yang berlangsung bukanlah sebuah proses yang dominatif dan hegemonik, akan tetapi sebuah proses yang mendasarkan diri pada kemanusiaan dan memicu secara konsisten munculnya kesadaran kritis, baik dari guru maupun murid.

Dalam kondisi ini Freire mengemukakan bahwa dengan gaya bank yang membius dan mematikan daya kreatif, maka pendidikan hadap masalah menyangkut suatu proses penyingkapan realitas secara terus menerus. Yang disebut pertama berusaha mempertahankan penenggelaman kesadaran, sementara yang disebut terakhir berjuang bagi kebangkitan kesadaran dan keterlibatan kritis dalam realitas.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 51.

⁴⁸ *Ibid.*, Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, hlm. 52

⁴⁹ Muhammad Hanif Dhakiri, *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan*, (Jakarta: Djambatan Pena, 200), hlm. 69.

⁵⁰ *Ibid.*, Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, hal. 63



Idealitas pendidikan bisa dicapai jika proses pembelajaran didasarkan pada relasi subyek-subyek, bukan subyek-obyek. Tapi konsep ini tidak berarti hanya menjadikan guru sebagai fasilitator *an sich*, karena ia harus terlibat bersama-sama dengan peserta didik dalam mengkritisi dan memproduksi ilmu pengetahuan (*knowledge production*). Guru, dalam pandangan Freire, tidaklah hanya menjadi tenaga pengajar, tetapi mereka juga harus memerankan diri sebagai pekerja kultural (*cultural workers*).⁵¹

Oleh karena itu mengajar bukannya memindahkan pengetahuan dengan hafalan. Mengajar tidak direduksi menjadi mengajar siswa saja, tetapi belajar akan menjadi valid bila siswa belajar untuk belajar (*learn to learn*).⁵² Tindakan mengajar yang dilakukan guru adalah sama dengan yang dilakukan murid dengan tindakan mengerti dan memahami apa yang diajarkan. Maka jelas bahwa mengajar adalah tindakan kreatif dan kritis, bukan hanya mekanis belaka. Keingintahuan guru dan murid bertemu dalam proses belajar mengajar itu. Dalam mengajar, guru mengenal lebih dalam pengertiannya dari pengertian murid.⁵³

3) Kurikulum Pendidikan

Persoalan isi pelajaran, secara sederhana menjadi konkret dalam kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran.⁵⁴ Isi bukanlah magis dan tidak netral, maka isi kurikulum selalu harus dikritisi. Guru dan murid perlu bekerjasama dalam menentukan isi yang mau dipelajari. Di sini pula perlu adanya dialog. Dalam pendidikan problem posing dengan jelas bahan itu ditentukan murid bersama guru dengan mengambil keadaan dari situasi hidup siswa, maka bahan menjadi bahan penyadaran akan keadaan murid.⁵⁵

Pendidikan harus memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk mengatakan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata orang lain. Murid harus diberi kesempatan untuk mengatakan dengan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata guru. Atas dasar itulah Freire menyatakan bahwa proses pengaksaraan dan keterbacaan yang dilakukan pada tingkat paling awal sekali dari semua proses pendidikan,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵² Paulo Freire, *Pedagogy Pengharapan*, Penerjemah Tim Penerbit Kanisius, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 81

⁵³ *Ibid.*, Paul Suparno, hlm. 25

⁵⁴ *Ibid.*, Paulo Freire, *Pedagogy Pengharapan*, hal. 109

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 109



haruslah benar-benar merupakan suatu proses yang fungsional, bukan sekedar suatu kegiatan teknis mengajarkan huruf-huruf dan angka-angka serta merangkainya menjadi kata-kata dalam kalimat yang telah tersusun secara mekanis.⁵⁶

Dari penjelasan di atas tentang kurikulum, Freire cenderung memberi kesempatan kepada guru dan murid secara utuh, mulai merancang kurikulum, pemilihan tema-tema sampai kepada pelaksanaan kurikulum yang sudah mereka rancang bersama. Hal ini berdasarkan konsep Freire mengenai cara murid belajar dengan aktif, di mana setiap murid memberikan sumbangannya terhadap proses belajar melalui tindakan nyata dan diskusi bersama yang bertempat pada kehidupan nyata sehari-hari, tempat belajar adalah ajang kehidupan itu sendiri.

4) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Tujuan utama pendidikan menurut Freire adalah *conscientizacao*, konsientisasi, penyadaran.⁵⁷ Yaitu peningkatan menuju kesadaran kritis sebagai fase kesadaran tertinggi. Kata konsientisasi berasal dari bahasa Brazil *conscientizacao*, suatu proses di mana manusia berpartisipasi secara kritis dalam aksi perubahan.⁵⁸

Munculnya kesadaran kritis manusia tidak bisa dipisahkan dari proses dialog yang sejati, yang tentu saja melibatkan pemikiran kritis yaitu pemikiran yang melihat suatu hubungan tak terpisahkan antara manusia dan dunia tanpa melakukan dikotomi antara keduanya. Pemikiran kritis melihat realitas sebagai proses dan perubahan, bukannya entitas yang statis.⁵⁹

Untuk meningkatkan kesadaran menuju ke kesadaran tertinggi yakni kesadaran kritis, yang dilakukan Freire adalah dengan melakukan pemilihan tematis generatif,⁶⁰ yang merupakan upaya aktualisasi realitas rakyat secara sederhana, menggunakan bahasa rakyat dan sudut pandang mereka. Pemilihan tema-tema tersebut akan mempermudah rakyat dalam memahami persoalan yang

⁵⁶ *Ibid.*, Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Read bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. xix.

⁵⁷ William A. Smith, *Conscientizacao; Tujuan Pendidikan Pendidikan Paulo Freire*, 2001, dalam MATABACA, Vol.1, No. 9, 2003, hlm. 30

⁵⁸ *Ibid.*, Paulo Freire, *Politik Pendidikan...*, hlm. 183

⁵⁹ *Ibid.*, Muhammad Hanif Dhakiri, hlm. 72

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 72



dihadapinya. Oleh karenanya pemilihan dan pemilahan tema-tema tersebut dilakukan bersama dengan rakyat dalam proses yang dialogis.

Ketajaman pemilihan dan pemilahan tema-tema generatif serta kodifikasi yang dilakukan bersama rakyat, akan mengantarkan rakyat kepada pemahaman diri rakyat dan realitasnya secara utuh dan lengkap bahwa ia ada dalam dan bersama dengan dunia yang oleh karenanya ia bertanggung jawab atas proses kemanusiannya sendiri tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain (dalam hal ini adalah kaum penindas). Akhirnya kesadaran rakyat akan semakin meningkat dan semakin kritis, sebagai bentuk tertinggi dari tingkat kesadaran yang dibangun dan sekaligus dicita-citakan Freire, sehingga dengan sendirinya akan mengurangi bahkan bisa jadi dapat menghilangkan struktur penindas dan yang tertindas secara gradual dan alamiah.

3. Pemikiran Muhammad Athiyah Al- Abrasyi Tentang Demokrasi Pendidikan

Inti dari pemikiran demokrasi pendidikan Al-Abrasyi adalah terletak pada pandangannya bahwa manusia itu merupakan makhluk liberal-individualis dan homo sosial. Berikut akan di jelaskan pokok-pokok pikiran demokrasi pendidikan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi.

a. Landasan Berfikir Muhammad Athiyah Al-Abrasyi

Prinsip utama pendidikan dalam pandangan al-Abrasyi adalah kemerdekaan/kebebasan/demokrasi. Demokrasi pendidikan menurut Muhammad Athiyah Al- Abrasyi adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Pemikiran Al- Abrasyi tentang demokrasi pendidikan, sejalan dengan konsep kebebasan manusia yang mengarah pada kesempatan dan persamaan dalam mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam demokrasi pendidikan islam yang menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar.⁶¹

Al-Abrasyi memandang manusia itu memiliki kebebasan (libral), dan kebebasan ini merupakan bagian dari khazanah intelektualitas Islam. kebebasan yang dikehendaki al-Abrasyi berjalan erat untuk kepentingan individu. Dikatan bahwa

⁶¹ *Ibid.*, M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok...*, hlm. 30



apabila kita hendak menjadikan pelajaran pada peserta didik bisa membawa hasil yang konkret, kita harus memberikan banyak kebebasan kepada anak. Namun, pandangannya tentang manusia sebagai makhluk liberal-individualis tidak mengurangi perhatiannya terhadap manusia sebagai homo-sosial. Sebab, kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dibatasi oleh kebebasan individu lain.⁶²

Pandangan al-Abrasyi tentang manusia sebagai makhluk liberal-individualis dan homo-sosial semacam itu _dengan demikian_tidak sampai pada sosio-antropo-sentris yang memusatkan ukuran nilai baik kepada masyarakat dan budaya, dan dari konsepnya mengenai fitrah, al-Abrasyi mencoba memandang manusia dalam prespektif Islami, dengan mengakui adanya sesuatu yang tetap, tidak berubah, dalam diri dan sifat manusia.⁶³

b. Metode pendidikan

Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi metode adalah jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik tentang semacam pelajaran dalam segala mata pelajaran.⁶⁴ Metode merupakan rencana yang dibuat oleh pendidik sebelum memasuki kelas dan menerapkannya di dalam kelas.

Adapun metode pendidikan islam yang relevan dan efektif dalam pengajaran islam menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi adalah:⁶⁵

- 1) Metode induktif (al-Istiqraiyah al-Istinbatiyah)
- 2) Metode deduktif (al-Qiyasiyah)
- 3) Metode periklanan (al-Ikhbariyah) dan metode pertemuan (al-Muhadharah)

Metode ini dilakukan dengan cara memasang iklan, pemberitahuan, pengumuman, brosur-brosur, berita-berita baik melalui televisi, radio maupun surat kabar, jurnal atau majalah. Metode ini dapat direalisasikan dengan menggunakan model-model sebagai berikut:

- 1) Ceramah(Lecturing/*al-mawidhah*)

⁶² Lihat, Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 194-195.

⁶³ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 145.

⁶⁴ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, Saudi Arabia: Dar al-Ahya', tth. 243.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 246-281

- 2) Tulisan(*Al-Kitabah*)
- 3) Metode dialog(*Hiwar*)

Untuk merealisasikan metode dialog dapat digunakan model-model sbb:

- 1) Tanya jawab(*Al-As'ilah wa Ajwibah*)
- 2) Diskusi(*Al-Niqasy*)
- 3) Bantah-bantahan(*Al-Mujadalah*)
- 4) Brainstorming(Sumbang saran)
- 5) Metode koreksi dan kritik(*Al-Tanqibiyah*)
- 6) Metode metavora(*Al-Amtsal*)
- 7) Metode permainan(*Al-La'bu / Game*)
- 8) Metode Drill(*Al-Tadrib wa Al-Muronah*)
- 9) Metode kuliah (*Muhadharah*)

c. Kurikulum Pendidikan

Dalam pendidikan modern dewasa ini, pembawaan dan keinginan peserta didik sangat diperhatikan. Oleh karena itu dalam pembuatan kurikulum Muhammad Athiyah al-Abrasyi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Harus ada mata pelajaran yang ditujukan mendidik rohani atau hati. Ini berarti perlu diberikan mata pelajaran ketuhanan.
- 2) Mata pelajaran harus ada yang berisi petunjuk dan tuntunan untuk menjalani cara hidup yang mulia, sempurna seperti ilmu akhlak, hadits, fikih dan lain sebagainya.
- 3) Mata pelajaran yang dipelajari oleh orang-orang islam karena mata pelajaran tersebut mengandung kelezatan ilmiah dan kelezatan ideologi, yaitu oleh ahli-ahli pendidikan utama dewasa ini dinamakan menuntut ilmu karena ilmu itu sendiri. Ilmu mempelajari untuk memenuhi rasa ingin tahu yang ada pada setiap manusia.
- 4) Pada mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Dengan kata lain, ilmu itu harus terpakai.
- 5) Pendidikan kejuruan, tehnik dan industrialisasi untuk mencari penghidupan.

⁶⁶ lihat juga Ahmad Tafsir, *Ilmu pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 66-67., lihat juga di Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, Pustaka setia, 1998, hal. 138-139.

- 6) Mata pelajaran yang diberikan berguna dalam mempelajari ilmu lain, yang dimaksud adalah ilmu alat seperti bahasa dan semua cabangnya.

d. Tujuan Pendidikan

Secara ringkas, Hasan Langgulung (1989) sebagaimana dikutip Abd. Rachman Assegaf, merangkum tujuan pendidikan menurut al-Abrasyi menjadi lima tujuan umum, yaitu:⁶⁷

- 1) Untuk membentuk akhlak yang mulia
- 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
- 3) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan atau tujuan vokasional dan professional
- 4) Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada pelajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui (*curiosity*) dan memungkinkan peserta didik mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu
- 5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu.

4. Perbandingan Pemikiran Demokrasi Pendidikan Paulo Freire dan Muhammad Athiyah al-Abrasyi

Berdasarkan analisis penulis, perbandingan pemikiran Demokrasi Pendidikan Paulo Freire dan Muhammad Athiyah al-Abrasyi adalah terletak dalam beberapa hal berikut:

a. Landasan berfikir

Gagasan Paulo Freire tentang demokrasi pendidikan atau dalam istilah Freire “Pembebasan” berangkat dari realitas masyarakat tertindas yang ada disekitarnya, yaitu di Brazil. Ia berpandangan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya kewenangan pemerintah, namun juga harus melibatkan secara dialogis masyarakatnya, sehingga tema-tema yang dikembangkan dalam pendidikan adalah sesuai kebutuhan masyarakat.

Gagasan revolusioner Freire terkait dengan pendidikan yang membebaskan, berangkat dari realitas sosial masyarakat di sekitar, sehingga konsep-konsep pendidikannya tidak lepas dari perhatiannya kepada kaum tertindas. Menurut Freire,

⁶⁷ Ibid, Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan*, hlm. 207.



hanya kaum tertindas yang, ketika membebaskan diri, dapat membebaskan para penindas mereka pula. Tujuan kaum tertindas adalah untuk menjadi manusia seutuhnya, karena itu mereka harus berjuang untuk menyelesaikan kontadiksi-diri lewat lahirnya manusia baru; bukan lagi penindas dan bukan tertindas melainkan manusia yang sedang dalam proses membebaskan diri.⁶⁸

Sedangkan Al-Abrasyi mendasarkan pandangannya tentang demokrasi pendidikan pada ajaran islam tentang fitrah (kesucian manusia), sehingga ia berpandangan manusia mempunyai kebebasan (liberal-individualistik). liberal-individualistik dalam pandangan Al-Abrasyi tidak bisa dipisahkan juga bahwa manusia merupakan makhluk homo-sosial.

Jadi, Freire dan Al-Abrasyi sepakat tentang penting demokrasi dalam dunia pendidikan. Bahkan Mastuhu mengatakan Impian pendidikan yang bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan.⁶⁹ Hal menunjukkan pentingnya institusi-institusi pendidikan kita dalam ranah praktis mengaktualisasikan sistem pendidikan yang demokratis ini.

Untuk mendukung terealisasinya iklim demokrasi dalam dunia pendidikan, menurut Zamroni ada tiga aspek dasar yang perlu diperbaharui dalam dunia pendidikan, yaitu aspek regulator; aspek profesionalitas; dan aspek manajemen. Diharapkan dengan reformasi tiga aspek tersebut, peserta didik dapat menemukan jati dirinya dan bertindak sesuai dengan dirinya; dapat memenuhi interest dan dapat sepenuhnya mengembangkan bakatnya; serta dapat mengambil keputusan secara rasional tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya demi kepentingan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Sejalan dengan ini, sekolah yang demokratis akan menjadi sumber pengembangan moral. Pemaksaan yang dilakukan di sekolah hanya akan menumbuhkan frustrasi yang cepat atau lambat akan melahirkan memerosotkan rasa percaya diri, keputus-asaan, dan kekerasan terhadap satu dengan yang lain.⁷⁰

Secara garis besar, reformasi ketiga aspek pendidikan tersebut, menurut Zamoroni akan bermuara pada perubahan ke-13 aspek sebagaimana tabel berikut.⁷¹

⁶⁸ *Ibid.*, Paulo Freire, dkk, *Menggugat Pendidikan...*, hlm. 446.

⁶⁹ *Ibid.*, Mastuhu, hlm. 84.

⁷⁰ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 11-12.

⁷¹ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 13-14



| No | Aspek | Paradigma pendidikan birokratis hirarkis | Paradigma pendidikan demokratis |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Perencanaan | <i>Top-down</i> | <i>Buttom-up</i> |
| 2 | Pelaksanaan | Didasarkan instruksi-petunjuk | Didasarkan asas profesionalitas |
| 3 | Standar | Output dan proses: nasional-makro | Output National Makro, Proses Lokal Mikro |
| 4 | Target | Nasional-Makro | Level sekoah-wilayah terbatas |
| 5 | Pemahaman tujuan-target | Didasarkan atas pedoman dari pusat | Didasarkan atas kondisi sekolah |
| 6 | Sistem intensif | Seragam dan kepatuhan | Sistem prestasi |
| 7 | Umpan balik orang tua-siswa | Tida diperlukan, kecuali bagi peserta didik yang bermasalah | Diperlukan secara teratur |
| 8 | Orientasi | Pengembangan intelektual (NEM) | Pengembangan aspek intelektua, personal dan sosial |
| 9 | Persepsi terhadap input | Masukan peserta didik diperlukan sebagai <i>raw input</i> yang menentukan hasil akhir | Masukan peserta didik bukan merupakan <i>raw input</i> , melainkan klien yang memerlukan pelayanan jasa sekolah |
| 10 | Evaluasi | Dilaksanakan pada titik-titik waktu tertentu dan bersifat seragam | Dilaksanakan sepanjang waktu dengan menekankan kebutuhan sekolah |
| 11 | Kontrol sekolah | Oleh atasan | Oleh orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar |
| 12 | Pengambilan keputusan | Ada ditangan kepala sekolah dengan perkenan atasan | Rapat guru, orang tua peserta didik dan kepala sekolah |
| 13 | Peran orang tua siswa dan masyarakat | Terbatas menyediakan dana | Terlibat dalam selurh proses pendidikan, kecuali menentukan nilai |

b. Pandangan Tentang Metode Pendidikan

Dalam konteks demokrasi pendidikan, dua tokoh ini memiliki pandangan yang sama terkait dengan pentingnya proses dialogis dalam pendidikan anatar guru dan murid. Adapun yang menjadi ciri khas Freire adalah dalam mengajukan metode pendidikan Freire menggunakan istilah "pendidikan hadap masalah" (*Problem posing education*). Sedangkan al-Abrasyi menggunakan metode *hiwar* (dialog), yang dilakukan dengan tanya-jawab, diskusi, bantah-batahan dan sebagainya.

Dalam konteks pendidikan, metode menjadi suatu hal yang sangat vital bagi keberhasilan proses pendidikan itu sendiri. Menurut Zamroni, yang penting bukan

materi apa materi yang diajarkan ataupun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan. Bagaimana guru mengajarkan materi tersebut menimbulkan apa yang disebut *iklim kelas (classroom climate)*.⁷²

Iklim kelas yang terbuka dan longgar sangat kondusif untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, sebab dalam iklim semacam itu suasana kelas akan bersifat demokratis sehingga proses belajar akan dinamis. Disamping itu, guru akan membawa “*controversial issue*” ke dalam kelas untuk didiskusikan oleh para siswa. Sedangkan dalam suasana kelas yang tertutup dan ketat, proses belajar akan statis, tidak memungkinkan munculnya ide dan kreatifitas siswa. Guru tidak akan berani membawa isu-isu yang “hangat” dan “sensitif” yang ada di masyarakat. Yang dipelajari hanya apa yang ada di buku teks.⁷³

Menurut hemat penulis, pandangan Freire dan Al-Abrasyi tentang metode pendidikan, yang menempatkan proses dialogis dalam praktek pendidikan akan melahirkan iklim kelas yang terbuka dan longgar.

Iklim kelas terbuka dan longgar atau tertutup dan ketat dapat dilihat dari empat dimensi:

- 1) Frekuensi guru membawa “isu-isu yang sensitif” untuk dikaji di kelas;
- 2) Rentang untuk munculnya berbagai pandangan yang berbeda;
- 3) Kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dengan bebas; dan
- 4) Toleransi guru untuk menerima pendapat dan perilaku yang menyimpang.⁷⁴

c. Pandangan Tentang Kurikulum Pendidikan

Dalam konteks kurikulum, kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sama bahwa dalam penyusunan kurikulum pembawaan dan keinginan peserta didik sangat diperhatikan. Dalam perumusan kurikulum keterlibatan murid sangat penting.

Menurut hemat penulis, keterlibatan murid dalam perumusan kurikulum adalah suatu hal yang sangat urgen, karena tanpa adanya partisipasi dengan murid akan terjadi Inkompatibilitas antara nilai-nilai yang disosialisasikan di sekolah dengan nilai-nilai yang disosialisasikan di lingkungan keluarga dan lingkungan lain, hal ini menurut Zamroni bisa menyebabkan siswa semakin terbawa pada nilai-nilai

⁷² *Ibid.*, Zamroni, hlm. 44.

⁷³ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 44-45.

⁷⁴ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 46.

“yang lain” atau nilai “baru”. di banyak negara dewasa ini dominasi politik pada lembaga pendidikan semakin kuat. Hal ini dicerminkan adanya kecenderungan pergeseran fungsi sekolah sebagai media sosialisasi nilai ke arah media indoktrinasi nilai-nilai. Berbeda dengan proses sosialisasi yang menekankan pada proses dan penghayatan nilai, maka indoktrinasi menekankan pada pentingnya hasil dari proses tersebut.⁷⁵

d. Pandangan Tentang Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dalam pandangan Freire adalah untuk membebaskan masyarakat dari penindasan dan menumbuhkan sikap kritis dalam masyarakat, sehingga mereka mampu melawan ketidaksewenangan penguasa. Sedangkan Al-Abrasyi pendidikan harus bertujuan mengembangkan fitrah manusia untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia dan kemampuan untuk memenuhi baik kehidupan dunia maupun akhirat.

Pandangan Freire dan Al-Abrasyi tentang tujuan pendidikan di atas, sejalan dengan tujuan muatan demokrasi dalam praktek pendidikan itu, yaitu mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan dan kesadaran atas tiga hal, yaitu: *pertama*, Demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara itu sendiri. *Kedua*, Demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. *Ketiga*, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi: kebebasan, persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis.⁷⁶

D. KESIMPULAN

Di era dewasa ini, pendidikan demokrasi menjadi suatu keharusan bagi suatu bangsa, karena demokrasi memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat manusia, dan peluang kerjasama yang dapat memenangkan semua pihak. Impian pendidikan yang bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan.

⁷⁵ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 35-36.

⁷⁶ *Ibid.*, Zamroni, hlm. 17.

Menurut Freire, demokrasi pendidikan atau pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai 'orang-orang yang tak beruntung' serta menyuguhi kaum tertindas itu model panutan diantara kaum penindas. Pendidikan kaum tertindas ini dijalankan oleh kemurah-hatian otentik, kedermawanan humanis (bukan *humanitarian*), menampilkan diri sebagai pendidikan manusia

Demokrasi pendidikan menurut Muhammad Athiyah Al- Abrasyi adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Pemikiran Al- Abrasyi tentang demokrasi pendidikan, sejalan dengan konsep kebebasan manusia yang mengarah pada kesempatan dan persamaan dalam mendapatkan pendidikan.

Adapun perbandingan pemikiran Demokrasi pendidikan Freire dan Al-Abrasyi adalah sebagai berikut:

1. Landasan berfikir

Palo Freire berpandangan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya kewenangan penguasa, namun juga harus melibatkan secara dialogis masyarakatnya, sehingga tema-tema yang dikembangkan dalam pendidikan adalah sesuai kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Al-Abrasyi mendasarkan pandangannya tentang demokrasi pendidikan pada ajaran islam tentang fitrah (kesucian manusia), sehingga ia berpandangan manusia mempunyai kebebasan sebagai makhluk liberal-individualisti sekaligus homo-sosial.

2. Metode Pendidikan

Dalam mengajukan metode pendidikan Freire menggunakan istilah "pendidikan hadap masalah" (*Problem posing education*). Sedangkan al-Abrasyi menggunakan metode *hiwar* (dialog), yang dilakukan dengan tanya-jawab, diskusi, bantah-batahan dan sebagainya.

3. Kurikulum

Dalam konteks kurikulum, kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sama bahwa dalam penyusunan kurikulum pembawaan dan keinginan peserta didik



sangat diperhatikan. Dalam perumusan kurikulum keterlibatan murid sangat penting.

4. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dalam pandangan Freire adalah untuk membebaskan masyarakat dari penindasan dan menumbuhkan sikap kritis dalam masyarakat, sehingga mereka mampu melawan ketidaksewenangan penguasa. Sedangkan Al-Abrasyi pendidikan harus bertujuan mengembangkan fitrah manusia untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia dan kemampuan untuk memenuhi baik kehidupan dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, Mohd. Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, Saudi Arabia: Dar al-Ahya'.



-
- Assegaf, Abd. Rachman, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, Depok: Rajawali Press, 2017
- _____, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Dakhiri, Muhammad Hanif , *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan*, Jakarta: Djambatan Pena, 2000.
- Freire, Paulo, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Terj. Alois A. Nugroho, Jakarta:Gramedia, 1984.
- _____, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Penerjemah Agung Prihantoro, dkk, Yogyakarta:Read bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- _____, dkk, *Menggugat Pendidikan: Fundamentalime, Konservatif, Liberal, Anarkis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Pedagogy Pengharapan*, Penerjemah Tim Penerbit Kanisius, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- _____, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Haramain, Abd. Malik , et.al. *Pemikiran-pemikiran Revolusioner* Yogyakarta: Averroes Press, 2001.
- Kasim, Abu, *Konsep Pendidikan Islam (Tela'ah pemikiran Muhammad Athiyah Al-Abrasyi*, IPTIAN (Knowledge Management Research Group, 2008.
- Mintara, Agustinus, dalam BASIS, Yogyakarta: Kanisius, No. 01-02, Tahun ke-50, Januari-Februari 2001.
- Maryoto, Aloys. *Pendidikan Sebagai Proses Penyadaran Menurut Paulo Freire dalam Fenomena*. Edisi 2/Th.V/1994.
- Nata, Abuddin, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*, edisi keempat Jakarta: Prenanada Media Group, 2012.
- Nuryanto, M. Agus, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Ramos, Myra Bergman (ed), *Education as The Practice of Freedom*, London:Writers 7 Readers Publishing Cooperative, 1974.



-
- SJ, Dennis E. Collins, *Paulo Freire: His Life, Works and Thought*, New York: Paulist Press, 1977.
- Supriyanto, Eko, dkk, *Inovasi Pendidikan: Isu-isu baru pembelajaran, manajemen, dan sistem pendidikan di Indonesia*, (Surakarta Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.
- Shaull, Richard, kata pengantar dalam *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta:LP3S, 2000.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu dalam Prespektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: BIAGRAF Publishing, tth.